

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG**

TESIS

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister
Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Andalas*

Oleh :

MUHAMMAD FAJRI SYAFRIZKA

1520122014



DOSEN PEMBIMBING :

- 1. PROF. Dr. SALDI ISRA, S.H., MPA**
- 2. Dr. AZMI FENDRI, S.H., M.Kn**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2019

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANG

Muhammad Fajri Syafrizka, NIM: 1520122014

96 Halaman

Penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Padang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 melalui tahapan paparan dan mediasi, selanjutnya dimana para pihak yang bersengketa tersebut dihadirkan/dipertemukan guna membahas penyelesaian sengketa yang dialami, setelah dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak maka dilakukan pengukuran berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah, dimana dalam sertifikat tersebut terdapat informasi berupa gambaran luas tanah yang menjadi objek sengketa, kemudian setelah memperoleh hasil pengukuran maka dapat diketahui apakah tanah yang sekarang sesuai atau tidak dengan yang ada di sertifikat, apabila sesuai, maka permasalahan tersebut terselesaikan bahwa tanah tersebut tidak terjadi sengketa batas, apabila tidak sesuai dilakukan mediasi berupa tata cara pengembalian batas yang kurang antara para pihak, sampai ada titik temu atau kesepakatan. Dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan tidak memuat ketentuan mengenai upaya hukum atas penyelesaian sengketa pertanahan. Oleh karena produk hukum atas Penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1), yakni berupa pembatalan hak atas tanah atau pembatalan sertifikat, yang mana hal tersebut adalah suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, sehingga upaya hukum atas keputusan tata usaha Negara tersebut adalah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketidakhadiran itu bisa dari salah satu pihak juga bisa dari kedua belah pihak yang enggan untuk datang dalam acara mediasi yang telah ditentukan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang selaku mediator, sehingga menghambat dalam proses mediasi karena dalam proses mediasi tersebut haruslah menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa, serta minimnya pengetahuan Kantor Pertanahan Kota Padang tentang asal usul dan riwayat tanah ulayat (pusako), karena riwayat tanah di Kota Padang bersumber dari tanah ulayat (pusako), maka kecenderungan masyarakat menyelesaikan masalah melalui kantor pertanahan minim sekali.

Kata Kunci : Penyelesaian, Sengketa Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional,

SETTLEMENT OF LAND DISPUTES BY THE NATIONAL LAND AGENCY OF PADANG

(Muhammad Fajri Syafrizka,1520122014,Master of Notary at Andalas University,96 Pages,2019)

ABSTRACT

Settlement of land dispute conducted by the Land office of Padang City is carried out based on the authority given by regulation of the Minister of Agrarian No. 11 year 2016 through the stage of exposure and mediation, in the future where the parties to the dispute are presented/Reaffirmable to discuss dispute resolution experienced, after the meeting between the two parties, the measurement is based on the certificate of property rights on the land, where in the certificate there is information about the area of land that is the object of dispute, then after obtaining the measurement results then it can be known whether the current land is suitable or not with the one in the certificate, when appropriate, then the problem is resolved that the land does not occur boundary disputes, if it is not suitable for mediation in the form of a refund procedure less than the parties, until there is a meeting point or agreement. In the provisions of the Minister of Agrarian Regulation No. 11 year 2016 concerning land dispute resolution does not contain provisions on remedies for settlement of land disputes. Oleh karena The legal product for the distribution of disputes or conflicts of land is as referred to in the provisions of article 24 paragraph (1), i.e. revocation of land rights or revocation of certificates, which is a government administrative decision which is also called State Administrative decree (*beschikking*),as referred to in law No. 5 of 1986 on the judicial administration of the state and law No. 30 year 2014, so that the remedies on the country's administrative decisions are to submit a lawsuit to the State Administrative court. Absence from either party can also from both parties who are reluctant to come in a mediation event that has been determined by the National Land Agency of the city of Padang as a mediator, so that it inhibits in the mediation process because in the mediation process must present both parties to the dispute, as well as the lack of knowledge of Padang City Pertanaha office about the origin and history of the land Ulayat (pusako), because the history of land in Padang is sourced from the land Ulayat (pusako), The likelihood of the community solves problems through the land Office is minimal.

Keywords : Settlement, Dispute Land, National Land Agency,